

NILAI-NILAI PERDAMAIAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Feriyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa, Ciamis, Indonesia

feriyanto@gmail.com

Abstract

This article intends to describe a necessity for the presence of peace amidst the diversity of society. This diversity is now an inevitable, especially the depletion of cultural boundaries, and ethnic identity which fuses in the context of globalization. One of the potentials in this diversity is the emergence of conflicts of interest and conflicts in the name of primordial identity. The offer of a multicultural approach will recognize the potential and legitimacy of diversity and socio-cultural differences of each ethnic group. In this view both individuals and groups of various ethnicities can join the community, engage in societal cohesion without having to lose their ethnic and cultural identity, while at the same time still obtaining their rights to participate fully in various fields of community activities.

Key Words: Multiculture; Peace; Values .

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mendeskripsikan sebuah keniscayaan hadirnya perdamaian ditengah-tengah keanekaragaman masyarakat. Keragaman ini kini merupakan keniscayaan tak terelakan terutama semakin menipisnya batas-batas kebudayaan, dan identitas etnik yang melebur dalam konteks globalisasi. Salahsatu potensi dalam keragaman ini adalah timbulnya konflik kepentingan maupun konflik atas nama identitas primordial. Tawaran pendekatan multikultural akan mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnik. Dalam pandangan ini baik individu maupun kelompok dari berbagai etnik dapat bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnik dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: Multikultur; Nilai-nilai; Perdamaian

PENDAHULUAN

Merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnik, suku, budaya dan agama. Sehingga tidak heran bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultur atau majemuk yang unik dan rumit. Masyarakat multikultural merupakan sebuah masyarakat yang didalamnya memiliki perbedaan

budaya, namun tetap memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlakuan. Oleh karena itu, cukup beralasan para *founding father* mencanangkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (Alwi Shihab, 2001: 3). Nilai idealisme yang terbangun dari semboyan ini mengandaikan terciptanya suasana kedamaian di atas keberagaman, suasana kerukunan di

atas keberagaman dan interaksi dialogis diatas perbedaan.

Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan mempunyai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu, maka konsep tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri, serta mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Dari sinilah muncul istilah multikulturalisme. Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *Politics of Recognition* (Azra, Azyumardi, 2007. "*Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*", <http://www.kongresbud.budpar.go.id>). Lawrence Blum (Lubis, 2006 : 174) mengungkapkan bahwa multikulturalisme mencakup suatu

pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Namun, dalam tataran realitasnya konflik antara agama, suku, budaya, ras masih sering terjadi di masyarakat. Misalnya dalam hal keberagaman, agama kadang-kadang sering sekali bertolak belakang dengan realitas keberagaman di masyarakat, fenomena yang terjadi menunjukkan sikap saling curiga dan tidak saling mempercayai (Sururin, 2007 :79).

Oleh karena itu, kajian ini akan melihat nilai-nilai perdamaian pada masyarakat multikultural dari perpektif sosiologis. Masalah ini dipandang penting untuk dibahas karena upaya mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat dengan segala perbedaannya, terlebih lagi mengingat bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang paling majemuk diantara bangsa-bangsa yang lain.

Secara akademik pembahasan judul tersebut dipandang relevan,

karena selama ini perkembangan budaya selalu dilihat dari perspektif teologis, dimana kajian budaya dengan pendekatan teologis hanya akan memunculkan dikotomis antara aliran utama dan aliran sempalan, sehingga pendekatan ini lebih menekankan analisa dan penilaian yang bersifat doktrinal teologis; aliran yang dianggap sebagai ortodoksi (Martin van Bruinessen. 1999: 243; Asep Gunawan (ed.). 2004: 209) adalah aliran yang benar. Sebaliknya, semua aliran yang dipandang tidak sejalan dengan kebenaran budayanya karenanya dicap sesat. Pendekatan teologis ini bukan tidak ada kelemahannya, akan tetapi akan memicu munculnya kecenderungan *judgement* (penghakiman); menyebut suatu aliran atau ajaran sebagai sesat.

Berbeda halnya dengan pendekatan sosiologis, dimana pendekatan ini mengandung relevansi yang tinggi bagi Pemerintah, agar respon terhadap etnis beserta kebudayaannya dapat dilakukan secara tepat dan sejalan dengan fungsi pemerintah sebagai pengayom yang melindungi kebudayaan setiap warganya.

Pemahaman multikultural dengan pendekatan sosiologis ini juga akan membawa implikasi pada sikap pemerintah dan masyarakat yang harus mengutamakan pendekatan persuasif sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat, dan perkembangan berbagai kebudayaan dengan segala dinamikanya harus diakui sebagai satu kenyataan sejarah.

PERDAMAIAN

Makna perdamaian adalah penghentian permusuhan dan perselisihan (KBBI, 2008). Istilah perdamaian diambil dari kata damai.

Definisi yang sederhana tentang damai adalah ketiadaan perang. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan antara seorang dengan yang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, dan antara manusia dan alam semesta. Perdamaian adalah suatu bentuk pemberdayaan manusia dengan keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun, menegakkan dan memperbaiki hubungan di semua level interaksi manusia
- b. Mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bersifat positif untuk menyelesaikan konflik, dimulai dari personal sampai internasional
- c. Menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun emosional yang dibutuhkan semua individu
- d. Membangun lingkungan yang aman secara berkelanjutan dan melindungi dari adanya eksploitasi dan perang (Zamroni. 2008 : 28)

Sedangkan Tudball (Zamroni. 2008: 31) mengemukakan bahwa perdamaian adalah tingkah laku yang saling menghargai dan penuh kedamaian kepada semua anggota komunitas dan menerapkan prinsip kesetaraan serta tidak diskriminatif, baik pada kebijakan administrasi maupun pada prakteknya. Untuk itu, salah satu tujuan dari perdamaian adalah memahami dan mengerti orang lain dan hal-hal yang mendasari pemikiran mereka, supaya bermanfaat sebagai jalan kehidupan dan kultur universal yang memiliki kontribusi dalam mengembangkan fondasi

kerjasama masyarakat dengan budaya yang berbeda (Hakvoort dalam Zamroni, 2008: 35).

MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri, yang tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi Indonesia dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai pemersatu kebudayaan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Model masyarakat multikultural ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam

penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan di daerah".

Dalam model masyarakat multikultural, sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah mozaik. Didalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar. Maka dari itu, yang perlu kita pelajari ialah bagaimana ketika kita telah menjadi bagian dari mayoritas tetapi tidak menindas atau mendiskriminasi terhadap kaum yang minoritas, karena disitulah poin penting dari pembelajaran tentang masyarakat multikultural.

Masyarakat multikultural ini harus dipahami dan dimaknai dalam konteks masa kini dan masa depan yang harus terus ditanamkan, masyarakat multikultural dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah salah satu dari empat pilar kehidupan bernegara yakni Pancasila, Undang-undang 1945, RI dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pancasila adalah falsafah dan dasar Negara yang menjadi landasan idiil bangsa Indonesia. UUD 45 adalah landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. RI adalah pemersatu bangsa dan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah perekat persatuan dalam untai kemajemukan.

NILAI-NILAI PERDAMAIAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Kedamaian selalu menjadi cita-cita orang yang cinta akan perdamaian. Kedamaian hanya akan terwujud bila

orang peduli dan menaruh empati. Dengan demikian, orang tidak lagi didasari sikap egois, sikap ingin menang sendiri, sikap iri hati dan merendahkan yang lain. Untuk terciptanya suasana kedamaian tentu dibutuhkan suatu usaha untuk saling mengenal, baik antar pribadi maupun lembaga dan komunitas. Ada pepatah "tak kenal maka tak sayang", pepatah ini kiranya menjadi kunci bagi kita dalam usaha saling mengenal, memahami dan toleran dengan pihak lain. Karena sudah kita ketahui bahwa wajah budaya Indonesia dikenal dengan ke-bhineka-annya, maka dari sanalah kita dituntut untuk mempunyai toleransi yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang kompak tapi beragam sehingga kaya akan ide-ide baru (Maman Imanulhaq Faqih, 2010: 17). Sehingga perbedaan di Indonesia bisa berkembang dalam berbagai dimensi yang ada dan menumbuhkan perdamaian di bumi Indonesia.

Idealnya, toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan masyarakat tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga harus disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Misalnya Gus Dur dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta, mengatakan (Rumadi, 2001: 144) :

"Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara

dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama umat beragama. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup dikalangan keluarga kiyai, itu tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain."

Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Penerimaan akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan apabila ada dialog antaragama. Dengan kata lain kerjasama tidak akan terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antaragama juga menjadi kewajiban (Abdurrahman Wahid, 2002 : 133-134).

Islam misalnya mengajarkan tentang pluralitas, seperti yang terdapat dalam QS. al-Hujurat: 13. Ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan. Tentu saja adanya berbagai keyakinan itu tidak perlu dipersamakan secara total, karena masing-masing memiliki kepercayaan atau aqidah yang dianggap benar. Demikian pula kedudukan penafsiran-penafsiran tentang aqidah. Umat Katolik sendiri memegang prinsip itu. Seperti dalam Konsili Vatikan II¹ yang dipimpin Paus

¹ Konsili Vatikan II adalah sebuah pertemuan (konsili) besar para Kardinal (pemimpin tertinggi gereja Katolik di suatu negara) se-dunia untuk membahas persoalan-persoalan penting dalam gereja Katolik atas undangan Sri Paus Yohanes

Yohannes XXIII dari tahun 1962-1965, menyebutkan bahwa para Uskup yang menjadi peserta menghormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran agama mereka. jadi keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan.

Disinilah nantinya terbentuk persamaan antar agama, bukannya dalam ajaran atau aqidah yang dianut, namun hanya pada tingkat capaian materi. Karena ukuran capaian materi menggunakan bukti-bukti kuantitatif seperti tingkat penghasilan rata-rata masyarakat yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran agar saling toleransi dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujudnya perdamaian.

Melalui perdamaian seorang bisa diantarkan untuk dapat memandang pluralitas, multikultural dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, sosial, dan agama sebagai kekayaan spiritual bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Ainurrofiq Dawam (2003: 104-105) memberikan kerangka orientasi Pluralisme atau Multikultural agar tidak kehilangan arah dan dibangun berdasarkan orientasi nilai dasar multikulturalisme guna terwujudnya perdamaian, yaitu:

1. Orientasi Kemanusiaan

Paulus XXIII di kota Vatikan 1962-1965. Kompilasi lengkap pembicaraan dan keputusan Konsili Vatikan II telah diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI (Konferensi Wali Gereja) Pusat tahun 1993 (edisi revisi). Ungkapan yang paling terkenal dari Konsili Vatikan II adalah keselamatan tidak hanya ada di Gereja Katolik Roma, dan implikasinya harus memberikan penghormatan kepada kepercayaan dan agama lain. Dan statemen ini merupakan pembaharuan dari cara pandang gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II yang memandang keselamatan hanya ada pada Gereja Katolik Roma.

Kemanusiaan atau humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan perdamaian.

Kemanusiaan bersifat universal, global di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama.

2. Orientasi kebersamaan.

Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang sama sekali lepas dari unsur kolusif maupun koruptif. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya. Dengan demikian diharapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang mendalam, dan terbuka.

3. Orientasi kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Konsistensi terhadap kesejahteraan harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Konsekuensi yang kemudian terjadi adalah adanya kedamaian di mana semua orang merasa aman, dihargai, diakui dan diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung.

4. Orientasi proporsional.

Proporsional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif dan tepat tujuan. Orientasi inilah

yang diharapkan menjadi pilar multikultural, pluralisme dan perdamaian.

5. Orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas.

Pluralitas dan heterogenitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasih dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang.

6. Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.

Dominasi dan hegemoni adalah dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Istilah ini dihindari jauh-jauh oleh para pengikut paham liberalis, kapitalis, globalis dan neoliberalis. Hegemoni yang dimaksud adalah hegemoni dalam segalanya; politik, pelayanan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, sebagai bangsa yang multikulturalis dalam membangun masa depan bangsa, dipandang perlu untuk memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara mewarnai perilaku dan kegiatan masyarakat. Berbagai kebudayaan itu jalan beriringan, saling melengkapi dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks itu pula, maka ribuan suku bangsa sebagai masyarakat multikulturalis yang terdapat di Indonesia serta potensi-

potensi budaya yang dimilikinya harus dilihat sebagai asset Negara yang dapat didayagunakan bagi pembangunan bangsa ke depan. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka.

Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka kearah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa dalam memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, misi utamanya adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai asset dan sumber kekuatan bangsa, menjadikannya suatu sinergi nasional, memperkuat gerak konvergensi keanekaragaman.

Oleh karena itu, walaupun masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaan di atas tanah kelahiran leluhurnya, namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh masyarakat lainnya yang sama-sama merupakan warga Negara Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan tanah leluhurnya termasuk sebagai bagian dari tanah air Indonesia. Satu hal yang harus kita pahami adalah perbedaan bukanlah hambatan. Seharusnya kita tidak

menyalahkan perbedaan yang ada karena perbedaan sudah selayaknya terjadi. Tapi salahkanlah mengapa kita tidak bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dan ikhlas. Memang sulit untuk menerima begitu banyak perbedaan yang ada dalam kehidupan. Namun, seharusnya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari setiap perbedaan yang ada. Karena sesungguhnya segala bentuk perbedaan bukanlah hambatan untuk kita menjalin persaudaraan.

Dengan demikian, membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, berarti juga membangun bangsa dan tanah air tanpa merasakannya sebagai beban, namun karena ikatan kebersamaan dan saling bekerjasama.

KESIMPULAN

Sejalan dengan proses reformasi yang sedang bergulir, dilandasi dengan bergulirnya demokrasi politik dan penegakan HAM menuju pada suatu bentuk masyarakat madani (*civil society*), diharapkan proses multikultural dapat terjembatani dengan baik. Dengan demikian proses integrasi nasional juga dapat terwujud dengan baik dan lebih permanen. Mengutip dari harian Kompas (14 Maret 2001, *Asimilasionisme vs Multikulturalisme*) yang dikemukakan dari pendapat berbagai ahli, bahwa pendekatan multikulturalism cocok diterapkan pada masyarakat yang multi etnik seperti di Indonesia. Ini artinya bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus menjembatani berkembangnya kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam ini dan menyiapkan media agar tiap-tiap kebudayaan yang berkembang itu dapat berkomunikasi dengan baik. Di sini pemerintah harus

bisa mengembangkan politik kebudayaan yang arif, menyediakan sarana dan prasarana yang kondusif, dapat melalui himbuan moral, dorongan atau dalam bentuk peraturan perundangan yang kondusif, agar kebudayaan-kebudayaan masyarakat dapat berkembang dengan baik, komunikatif dan tidak konservatif tertutup.

Berbeda dengan pendekatan asimilasi dan diskriminasi, tawaran pendekatan multikultural akan mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnik. Dalam pandangan ini baik individu maupun kelompok dari berbagai etnik dapat bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnik dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Karena satu-satunya kebutuhan kita adalah bagaimana membuat semua keberagaman ini memberikan sumbangan yang paling berharga bagi semua orang.

Ada beberapa pesan yang hendak disampaikan penulis. *Pertama* adalah mengenai realitas yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang sama di dunia, semua serba berbeda dan beragam. Adanya kenyataan hidup yang serba beragam tidak lantas menjadikan manusia terpecah belah dan saling berkonflik. Realitas hidup yang menyatakan adanya kemajemukan harus diinsafi, dikelola dengan baik dan disikapi dengan arif dan bijaksana. *Kedua* yang disampaikan adalah bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara dengan sesamanya. Oleh karena

itu, tidak ada yang boleh merendahkan atau meremehkan manusia lainnya. Saling menghargai antar suku di bidang apapun dan apapun kegiatannya; memahami kondisi

masing-masing (saling menghargai); dan sesulit apapun masalah yang dihadapi berusaha untuk tersenyum meski sulit.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid, 2002. *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute
- Alwi Shihab, 2001. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: kerjasama Mizan dan ANTEVE, cetakan IX,
- Azra, Azyumardi, 2007. "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia", <http://www.kongresbud.budpar.go.id>
- Dawam, Ainurrofiq, 2003. *Emoh Sekolah; Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Kompas, 14 Maret 2001, *Asimilasionisme vs Multikulturalisme*.
- Lubis, 2006. "Deskonstruksi Epistemologi Modern". Jakarta: Pustaka Indonesia Satu
- Maman Imanulhaq Faqih, 2010. *Fatwa dan Canda Gus Dur*, Jakarta: Kompas
- Rumadi, 2001. "Dinamika Agama dalam Pemerintahan Gus Dur", dalam Khamami Zada (ed) *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, Jakarta: LAKPESDAM
- Sururin, 2007. *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak*. Bandung: Nuansa
- Zamroni. 2008. *Peace Education A Reader*. (artikel)